

PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

005.01.402050

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2018

Jln. Soekarno-Hatta No. 214

Payakumbuh - Sumatera Barat

Telp. 0752-92603 Fax. 0752-92603-7970992

e-mail : papayakumbuh@yahoo.co.id



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jln. Soekarno-Hatta No. 214

Telp. 0752-92603 Fax. 0752-7970992

Payakumbuh - Sumatera Barat

e-mail : papayakumbuh@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Payakumbuh adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Payakumbuh mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Payakumbuh. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Payakumbuh, 15 Februari 2019

Kuasa Pengguna Anggaran,
Plh. Sekretaris,



WINDY SAFITRA, S. KOM
NIP.197806162009121005

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan.....	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca.....	16
III. Laporan Operasional.....	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	22
V. Catatan atas Laporan Keuangan	24
A. Penjelasan Umum.....	24
A.1. Dasar Hukum.....	24
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Payakumbuh	25
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	26
A.4. Basis Akuntansi	26
A.5. Dasar Pengukuran	27
A.6. Kebijakan Akuntansi	27
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	36
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	36
B.2. Belanja	37
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	41
C.1. Aset Lancar	41
C.2. Aset Tetap.....	43
C.4.2 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	47
C.5. Kewajiban Jangka Pendek.....	48
C.6. Ekuitas	49

D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	50
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	50
D.2.	Beban Pegawai	50
D.3.	Beban Persediaan.....	51
D.4.	Beban Barang dan Jasa	52
D.5.	Beban Pemeliharaan	52
D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	53
D.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	53
D.8.	Kegiatan Non Operasional	54
D.9.	Pos Luar Biasa	55
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	55
E.1.	Ekuitas Awal	55
E.2.	Surplus (defisit) LO	55
E.3.	1. Penyesuaian Nilai Aset.....	55
E.3.	4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	55
E.3.	Transaksi Antar Entitas	56
E.3.	Ekuitas Akhir	56
F.	Pengungkapan Penting Lainnya.....	56
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	56
F.2.	Pengungkapan Lain-lain.....	57
	Daftar dan Lampiran.....	60
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	61

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Payakumbuh

Jln. Soekarno-Hatta No. 214 Payakumbuh - Sumatera Barat
Telp. 0752-92603 Fax. 0752-92603 e-mail : papayakumbuh@yahoo.co.id

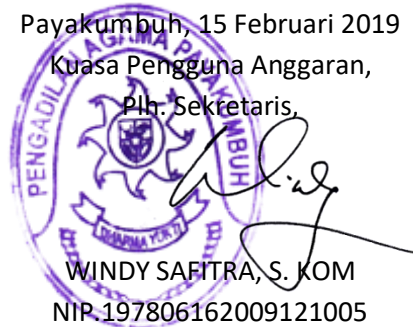
Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Payakumbuh yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Payakumbuh telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Payakumbuh, 15 Februari 2019

Kuasa Pengguna Anggaran,
Plh. Sekretaris,



WINDY SAFITRA, S. KOM

NIP.197806162009121005

RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2018 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2018 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 34.059.096,- atau mencapai 341 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp 10.000.000,-

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar Rp 5.648.892.702,- atau mencapai 100.00 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 5.665.024.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2018 dan 2017 .

Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp 16.772.593.167,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 450.000,- ; Aset lain-lain sebesar Rp. 7.485.000,- Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 16.772.593.167,-

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp 13.918.075,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 13.917.075,- dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp. 16.16.758.675.092,-, yang terdiri dari Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp. 16.772.593.167,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 18.203.319,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 5.461.537.541,- sehingga terdapat (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 5.443.334.222,-) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar (Rp. 0,-) dan surplus(defisit) Kegiatan Non Operasional sebesar Rp. Rp.15.861.777,- sehingga surplus/(defisit) -LO sebesar (Rp. 5.427.472.445,-)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 16.571.313.931,- dikurangi (defisit)-LO sebesar (Rp.5.427.472.445,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 5.614.833.606,- sehingga kenaikan/penurunan Ekuitas Rp. (187.361.161,-) dan ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp. 16.758.675.092,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2018, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2018 DAN 2017
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	31 Desember TA 2018			TA 2017
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	10.000.000	34.069.096	341	19.779.054
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		10.000.000	34.059.096	341	19.779.054
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	4.472.338.000	4.465.469.165	100	3.035.324.310
2.	Belanja Barang	B.2.2.	570.772.000	557.519.537	98	601.023.713
3.	Belanja Modal	B.2.3.	632.000.000	625.904.000	99	639.418.060
	Jumlah Belanja Negara		5.665.024.000	5.648.892.702	140	4.275.766.083

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH
NERACA
PER 31 Desember 2018 DAN 2017
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
ASET			
Aset Lancar			
C.1			
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1. 2.	0	0
Persediaan	C.1. 3.	450.000	458.000
Jumlah Aset Lancar		450.000	458.000
Aset Tetap			
C.2			
Tanah	C.2. 1.	5.984.628.000	5.984.628.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	2.096.483.041	2.047.631.041
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	10.636.692.900	10.059.640.900
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	15.815.968	15.815.968
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(1.961.476.742)	(1.528.076.571)
Jumlah Aset Tetap		16.772.143.167	16.579.639.338
Aset Lain-Lain	C.4. 1.	7.485.000	350.090.340
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4. 2.	(7.485.000)	(350.090.340)
Jumlah Aset		16.772.593.167	16.580.097.338
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
C.5			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	13.918.075	8.783.407
Uang Muka dari KPPN	C.5. 2.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		13.918.075	8.783.407

Jumlah Kewajiban		35.000.000	8.783.407
EKUITAS		16.758.675.092	16.571.313.931
Ekuitas Dana Lancar	C.6	0	0
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		16.772.593.167	16.580.097.338

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 Desember 2018 DAN 2017
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	18.203.319	17.679.030
Jumlah Pendapatan		18.203.319	17.679.030
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	4.469.648.683	3.042.565.780
Beban Persediaan	D. 3	28.057.000	26.408.000
Beban Barang dan Jasa	D. 4	325.585.382	334.231.654
Beban Pemeliharaan	D. 5	135.963.309	172.953.345
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	68.882.996	69.156.646
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	433.400.171	379.348.880
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		5.461.537.541	4.024.664.305
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(5.443.334.222)	(4.006.985.275)
Kegiatan Non Operasional			
		D. 12	
Surplus /(defisit) pelepasan aset non lancar		15.855.777	2.100.000
Pendapatan pelepasan aset non lancar		0	0
Pendapatan dari kegiatan non operasional		15.855.777	2.100.000
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		15.855.777	2.100.000
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		0	0

Pos Luar Biasa	D. 13	0	
Surplus/Desfisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya		6.000	210.024
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya		6.000	227.024
Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya		0	17.000
Jumlah Surplus/(defisit) dari kegiatan Non Operasional Lainnya		15.855.777	2.310.024
Surplus/(defisit) dari kegiatan Non Operasional Lainnya		15.855.777	2.310.024
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(5.427.472.445)	(4.004.675.251)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Ekuitas Awal	E. 1	16.571.313.931	12.499.492.096
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(5.427.472.445)	(4.004.675.251)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar		0	0
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas		0	3.820.510.057
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	3.830.430.532
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E. 6	0	(2.662.000)
Koreksi Lain-lain	E. 8	0	0
Lain-lain	E. 9	0	(7.258.475)
Transaksi Antar Entitas	E. 10	5.614.833.606	4.255.987.029
Kenaikan/ Penurunan Ekuitas	.	187.361.161	4.071.821.835
Ekuitas Akhir		16.758.675.092	16.571.313.931

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Payakumbuh

Visi Pengadilan Agama Payakumbuh adalah Visi Pengadilan Agama Payakumbuh adalah **Terwujudnya Pengadilan Agama Payakumbuh sebagai salah satu Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.**

Misi Pengadilan Agama Payakumbuh adalah Misi Pengadilan Agama Payakumbuh adalah:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Payakumbuh.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama Payakumbuh.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Payakumbuh.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Payakumbuh

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Payakumbuh melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Payakumbuh melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasi, menganalisa dan merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan.
2. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Agama Payakumbuh. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis

kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Payakumbuh adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang

tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8.) Penyisihan Utang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	3. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 4. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9.) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset

Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah : Rp
34.059.096*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 34.059.096 atau mencapai 341 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Payakumbuh adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	10.000.000	18.163.600	341
2.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	39.719	0,00
3.	Pendapatan Pemindahtanganan BMN	0	15.855.777	0,00
4.	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0,00
5.	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
Total Pendapatan		10.000.000	34.059.096	341

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp. 34.059.096,- dibandingkan TA 2017.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2018 dan 2017 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2018 dan 2017
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2018	2017	Perubahan	
				Rp	%
1.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	18.163.600	17.679.030	484.570	341
2.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	39.719	24	39.695	0
3.	Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya	15.855.777	2.100.000	13.755.777	0,00
4.	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0
5.	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0
Total Pendapatan		34.059.096	19.779.054	14.280.042	341

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Negara : Rp 5.648.892.702,-

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Payakumbuh per 31 Desember TA 2018 adalah sebesar Rp. 5.648.892.702,- setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 140% dari anggaran senilai Rp 4.472.338.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

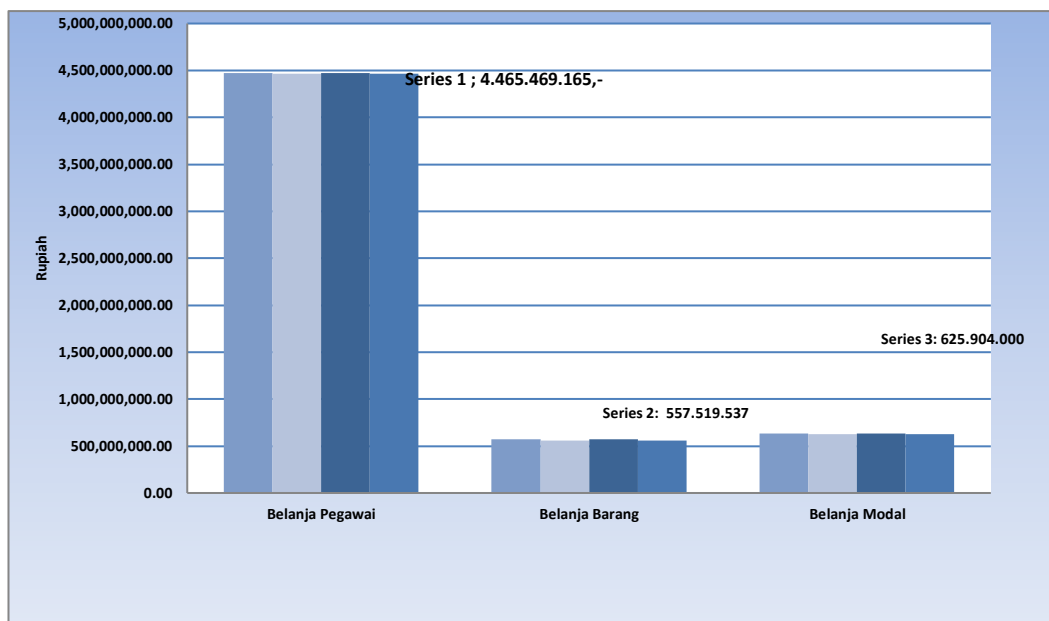
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2018		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	4.472.338.000	4.465.469.165	96
Belanja Barang	570.772.000	557.519.537	97.68
Belanja Modal	632.000.000	625.904.000	99.04
Total Belanja Bruto	5.665.024.000	5.655.694.084	100
Pengembalian Belanja		6.801.382	0
Total Belanja Netto	5.665.024.000	5.648.892.702	100

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAIBA) 2018 & 2017



Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar (Rp.1.604.622.702,-) atau sebesar 100 persen dari realisasi tahun lalu pada periode berjalan. kenaikan tersebut disebabkan adanya penambahan mutasi pegawai pada Kantor Pengadilan Agama Payakumbuh kelas 1B.

Perbandingan realisasi belanja TA 2018 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	Naik (Turun)		TA 2017	Naik (Turun)	
		Rp	%		Rp	%
Belanja Pegawai	4.465.469.165	(1.623.971.165)	100	3.152.775.000	117.450.690	96
Belanja Barang	557.519.537	13.252.463	99	635.772.000	34.748.287	95
Belanja Modal	625.904.000	6.096.000	99	640.000.000	581.940	100
Total Belanja	5.648.892.702	1.604.622.702	100	4.275.766.083	152.780.917	100

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp
4.465.469.165,-*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Payakumbuh per 31 Desember TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp.4.465.469.165,- dan Rp. 3.035.324.310,-

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.468.837.040	1.151.662.160	317.174.880	100
Beban Pembulatan Gaji PNS	18.932	12.963	5.969	105.18
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	115.539.842	80.855.950	34.683.892	100
Beban Tunj. Anak PNS	33.480.000	22.161.326	11.318.674	100
Beban Tunj. Struktural PNS	36.400.000	32.620.000	3.780.000	100
Beban Tunj. Fungsional PNS	2.225.380.000	1.360.100.000	865.280.000	100
Beban Tunj. PPh PNS	267.655.355	146.829.745	120.825.610	100
Beban Tunj. Beras PNS	72.202.740	57.356.640	14.846.100	100
Beban Uang Makan PNS	245.726.000	179.641.000	66.085.000	99.97
Beban Tunjangan Umum PNS	7.030.000	3.885.000	3.145.000	100
Beban Uang Lembur	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	4.472.270.547	3.035.324.774	1.436.945.773	100
Pengembalian Belanja	6.801.382	464	6.800.918	0
Total Belanja Netto	4.465.469.165	3.035.324.310	1.430.144.855	100

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja Barang
: Rp.
557.519.537*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Payakumbuh per 31 Desember TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp. 557.519.537,- dan Rp. 601.023.713

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	232.955.431	231.458.695	1.496.736	98.71
Belanja Barang Operasional Lainnya	0	0	0	0
Belanja Barang Konsumsi persediaan	37.962.500	39.990.500	(2.028.000)	99.96
Belanja Barang Non Operasional	4.767.000	6.075.000	(1.308.000)	99.98
Belanja Jasa	86.907.801	90.188.517	(3.280.716)	89.6
Belanja Pemeliharaan	126.043.809	159.155.845	(33.112.036)	99.91
Belanja Perjalanan Dinas	68.882.996	69.156.646	(273.650)	99.99
Total Belanja Brutto	557.519.537	601.023.713	(43.504.176)	97.68
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	557.519.537	0	(43.504.176)	97.68

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja Modal
:Rp.
625.904.000,-

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Payakumbuh per 31 Desember TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp. 625.904.000,- dan Rp. 639.418.060,-

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan & Mesin	48.852.000	439.560.060	(390.708.060)	93.95
Belanja penambahan nilai Gedung & Bangunan	577.052.000	199.856.000	377.196.000	99.49
Total Belanja Brutto	625.904.000	639.418.060	(13.514.060)	99.04
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	625.904.000	243.254.360	(13.514.060)	99.04

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp
450.000,-

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 450.000,- dan Rp 458.000,-.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Payakumbuh per 31 Desember 2018 dan 2017 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Belanja Dibayar di Muka	0	0
Persediaan	450.000	458.000
Total Aset Lancar	450.000	458.000

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran: Rp
0,-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2018	31 Desember TA 2017
1	Kas di bendahara pengeluaran	0,-	0,-
	Jumlah	0,-	0,-

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja Dibayar
di Muka: Rp0*

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp 0,-. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Rincian Belanja Dibayar di Muka (dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2018	31 Desember 2017
1	Persekot Gaji karena pindah	0	0
	Jumlah	0	0

C.1.3. Persediaan

*Persediaan: Rp.
450.000,-*

Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 450.000,- dan Rp. 458.000,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 31 Desember TA 2018 dan 31 Desember 2017

No.	Uraian	31 Desember 2018	2017
1	Barang Konsumsi	450.000	458.000
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0

10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		450.000	458.000

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp
16.772.143.167,-*

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 tersaji sebesar Rp. 16.772.143.167,- dan Rp. 16.579.639.338,-. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember TA 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2018	TA 2017	Perubahan	%
1	Tanah	5.984.628.000	5.984.628.000	0	0
2	Peralatan dan Mesin	2.096.483.041	2.047.631.041	48.852.000	2.39
3	Gedung dan Bangunan	10.636.692.900	10.059.640.900	577.052.000	5.74
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	15.815.968	15.815.968	0	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0	14.01
Jumlah		18.733.619.909	18.107.715.909	625.904.000	
Akumulasi Penyusutan		(1.961.476.742)	(1.528.076.571)	(433.400.171)	28.36
Nilai Buku Aset Tetap		16.772.593.167	16.579.639.338	(192.903.829)	1.16

C.2.1. Tanah

*Tanah: Rp.
5.984.628.000,-*

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 5.984.628.000,- dan Rp. 5.984.628.000.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2017	Rp. 5.984.628.000
Mutasi Tambah	Rp. 0
Mutasi Kurang	0
Jumlah	Rp.5.984.628.000
Saldo per 31 Desember 2018	Rp. 5.984.628.000

Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	(0)
Nilai Buku 31 Desember 2018	Rp. 5.984.628.000

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	1	599	03.06.01.03.4.0007	Pemerintah RI	Gedung Kantor	0
2.	2	750	03.06.01.03.4.0002	Pemerintah RI	Gedung Kantor	0
3.	3	973	03.06.01.03.4.0001	Pemerintah RI	Gedung Kantor	0
4.	4	87			Gedung Kantor	179.628.000
5.		2.322			Gedung Kantor	5.805.000.000
Jumlah						5.984.628.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp
2.096.483.041*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.096.483.041,- dan Rp. 2.047.631.041. Adanya belanja modal peralatan dan mesin pada TA 2018 berupa 4 unit Laptop.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2017	2.047.631.041
per 31 Desember 2018	2.096.483.041
	0
Reklas Masuk	0
Jumlah	Rp. 2.096.483.041

Saldo per 31 Desember 2018	2.096.483.041
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	(1.455.318.240)
Nilai Buku 31 Desember 2018	641.164.801

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp
10.636.692.900,-*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 10.636.692.900,- dan Rp. 10.059.640.900,-. Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp. 0,- pada tahun 2018 adanya

pengadaan belanja modal berupa pengembangan sarana lingkungan gedung kantor taman permanen.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	10.059.640.900
Mutasi Tambah	0
Gedung dan Bangunan	10.059.640.900
Saldo per 31 Desember 2018	10.059.640.900
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	(506.158.502)
Nilai Buku 31 Desember 2018	10.130.534.398

Rincian aset tetap gedung dan bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp 0,-*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2017	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2018	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	0
Nilai Buku 31 Desember 2018	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp
15.815.968*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp.

15.815.968 dan Rp. 15.815.968

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2017	15.815.968
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	0
Nilai Buku 31 Desember 2018	15.815.968

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam
Pengerjaan : Rp
0,-*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp
(1.961.476.742)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing Rp (1.961.476.742,-) dan Rp (1.528.076.571,-).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2018 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.096.483.041	(1.455.318.240)	641.164.801
2	Gedung dan Bangunan	10.636.692.900	(506.158.502)	10.130.534.398
3	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	7.485.000	7.485.000	0
4	Aset Tetap Lainnya	15.815.968	0	15.815.968
Jumlah		12.756.476.909	1.968.961.742	10.787.515.167

C.4.1. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain :
Rp. 7.485.000

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 7.485.000,- dan Rp. 350.090.340 Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Payakumbuh.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2017	350.090.340
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	7.485.000
Saldo per 31 Desember 2018	7.485.000

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya:
Rp 7.485.000,-

C.4.2 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 7.485.000,- dan Rp. 350.090.340,- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset lainnya. Rincian Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Lain-lain	7.485.000	7.485.000	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp 13.918.075,-*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 13.918.075,- dan Rp. 8.783.407,-. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Payakumbuh per 31 Desember 2018 disajikan pada tabel di bawah :

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017
Utang Kepada Pihak Ketiga	13.918.075	8.783.407
Uang Muka dari KPPN	0	0
Jumlah	13.918.075	8.783.407

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada
Pihak Ketiga:
Rp 13.918.075,-*

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 13.918.075,- dan Rp. 8.783.407,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada

pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Pengadilan Agama Payakumbuh per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No.	Uraian	Jumlah
1.	Air PDAM	0
2.	Listrik	0
3.	Telpon	0
4.	Internet	0
	Jumlah	0

C.5.2. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN:
Rp 0,-

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

Ekuitas Rp.
16.758.675.092

Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 16.758.675.092,- dan Rp. 16.571.313.931,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 terdapat nilai Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp. 16.772.593.167,- dan Rp. 16.580.097.338,-. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.13.918.075,-, sedangkan per 31 Desember TA 2017 tercatat sebesar Rp. 8.783.407,-.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNbp : Rp
34.059.096,-*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp 34.059.096,- dan Rp 19.779.054,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	18.163.600	181,63
2.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
3.	Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya	0	15.855.777	0,00
4.	Pendapatan sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	39.719	0,00
5.	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
Total Pendapatan		0	34.059.096	340,59

D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai
: Rp
4.469.648.683,-*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 4.469.648.683,- dan Rp. 3.042.565.780,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.469.393.540	1.157.972.940	311.420.600	21.19
Beban Pembulatan Gaji PNS	18.932	12.983	5.949	31.42
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	115.595.492	81.663.564	33.931.928	29.35
Beban Tunj. Anak PNS	33.502.898	22.484.372	11.018.526	32.89
Beban Tunj. Struktural PNS	36.400.000	32.620.000	3.780.000	10.38
Beban Tunj. Fungsional PNS	2.228.380.000	1.360.100.000	868.280.000	38.96
Beban Tunj. PPh PNS	268.200.463	146.829.745	121.370.718	45.25
Beban Tunj. Beras PNS	72.202.740	57.356.640	14.846.100	20.56
Beban Uang Makan PNS	245.726.000	179.641.000	66.085.000	26.89
Beban Tunjangan Umum PNS	7.030.000	3.885.000	3.145.000	44.74
Beban Uang Lembur	0	0	0	0
Total Beban Pegawai	4.469.648.683	3.042.565.780	1.427.082.903	46.904

D.3. Beban Persediaan

Beban
Persediaan : Rp
28.057.000,-

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 28.057.000,- dan Rp. 26.408.000,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2018 dan TA 2017

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	28.057.000	26.408.000	(1.649.000)	(6.244)
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Bahan untuk pemeliharaan	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	28.057.000	26.408.000	(1.649.000)	(6.244)

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa : Rp
325.585.382,-*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 325.585.382,- dan Rp. 334.231.654,- Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 31 Desember TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	183.251.993	183.614.583	(362.590)	98.57
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	827.000	530.150	296.850	68.92
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	45.600.000	40.680.000	4.920.000	100
Beban Barang Operasional Lainnya	3.325.000	13.518.510	(10.193.510)	100
Beban Bahan	4.767.000	6.075.000	(1.308.000)	99.98
Beban Sewa	0	0	0	0
Beban Langganan Listrik	78.161.536	75.298.633	2.862.903	96.5
Beban Langganan Telepon	3.861.593	3.151.378	710.215	60.59
Beban Langganan Air	5.791.260	1.763.400	4.027.860	55.48
Total Beban Jasa	325.585.382	334.231.654	(8.646.272)	2.587

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp
135.963.309,-*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 135.963.309,- dan Rp. 172.953.345,- Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	37.037.500	57.826.000	20.788.500	99.91
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	89.006.309	84.026.845	4.979.464	93.95
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	9.919.500	13.797.500	(3.878.000)	99.96
Beban Pemeliharaan Jaringan	0	0	0	
Total Beban Pemeliharaan	135.963.309	172.953.345	(36.990.036)	21.387

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban
Perjalanan
Dinas : Rp
68.882.996,-

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 68.882.996,- dan Rp. 69.156.646,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	68.882.996	69.156.646	(273.650)	0.396
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	
Total Beban Perjalanan Dinas	68.882.996	69.156.646	(273.650)	0.396

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi : Rp
433.400.171,-

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 433.400.171,- dan Rp 379.348.880,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk

periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	226.098.954	70.299.420	155.799.537	99.49
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	207.301.217	100.436.407	106.864.810	93.35
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	433.400.171	379.348.880	54.051.291	14.248

D.8. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional Lainnya : Rp 0,-

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

**Rincian Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Surplus/ Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	15.855.777	2.100.000	13.755.777	(655.037)
Pendapatan pelepasan Aset Non Lancar	15.855.777	2.100.000	13.755.777	(655.037)
-. Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Jumlah Surplus / defisit pelepasan Aset Non Lancar	15.855.777	2.100.000	13.756.000	(655.037)
Surplus / Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	6.000	210.024	(204.024)	(97.143)0
-. Pendapatan dari kegiatan Non operasional lainnya	6.000	227.024	(227.024)	(97.357)0
-. Beban dari kegiatan Non operasional Lainnya	0	17.000	(17.000)	(100)
Jumlah Surplus /Defisit dari Kegiatan Non Operasional	15.861.777	2.310.024	13.551.753	586.65
Surplus/Desfisit sebelum pos luar biasa	(5.427.472.445)	(4.004.675.251)	(1.422.797.194)	35.528
Surplus /defisit LO	(5.427.472.445)	(4.004.675.251)	(1.422.797.194)	(35.528)

D.9. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp 0,-

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa
per 31 Desember TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.16.571.313.931,- dan Rp. 12.499.492.096,-

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar (Rp. 5.427.472.445,-) dan (Rp 4.004.675.251,-) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

E.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp (2.662.000,-),- Koreksi ini berasal dari

transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.614.833.606,- dan Rp. 4.255.987.029,- Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 31 Desember TA 2018
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	34.059.096
Ditagihkan ke Entitas Lain	5.648.892.702
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	5.682.951.798

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 16.758.675.092,- dan Rp. 16.571.313.931,-.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Pada Laporan Keuangan 31 Desember 2018 ini tidak ada temuan BPK dan tindak lanjut temuan BPK terhadap Laporan Keuangan tahun sebelumnya.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Pada Laporan Keuangan 31 Desember 2018 tidak ada informasi belanja secara akrual.

1. Belanja pegawai yang harus dibayar yaitu berupa kekurangan gaji An. Dra. Hj. Ernawati, SH sebesar Rp. 4.179.518
2. Belanja barang yang harus dibayar berupa langganan listrik bulan desember 2018 sebesar Rp. 6.957.708,-
3. Belanja barang yang harus dibayar berupa langganan Telepon bulan desember 2018 sebesar Rp. 305.709,-
4. Belanja barang yang harus dibayar berupa langganan Air bulan desember 2018 sebesar Rp. 540.540,-
5. Belanja barang yang harus dibayar berupa langganan Internet bulan desember 2018 sebesar Rp1.934.600,-

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Payakumbuh adalah:

Bank Rakyat Indonesia Cabang Payakumbuh Nomor Rekening : 0256.01.000.101.30.2 an BPG 011 PA Payakumbuh yang digunakan sebagai penabung DIPA BUA dengan saldo akhir per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.0,-

F.2.4. Revisi DIPA

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Payakumbuh ada melaksanakan Revisi DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Nomor : SP DIPA-005.01.2.402050/2018.

Revisi 1 tanggal 09 Agustus 2018 DS : 5471-1972-0039-9390 tentang perubahan Halaman III DIPA dan pertukaran pejabat perbendaharaan.

Revisi 2 tanggal 02 Oktober 2018 DS : 3910-6368-3216-3340 tentang perubahan Halaman III DIPA.

Revisi 3 DJA tanggal 19 November 2018 DS : 6105-7009-8040-4016 tentang perubahan Pagu.

Revisi 4 DJA tanggal 08 Februari 2019 DS : 0866-9358-9353-0991 tentang perubahan pergeseran pagu minus.

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak ada ralat SPM per 31 Desember 2018.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 01/KPA.PAPYK/I/2018 Tanggal 02 Januari 2018 dan sekretaris dan penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Staf pengelola keuangan yaitu:

Satker	Jabatan	Semula	Menjadi	Tanggal Penggantian
PA Payakumbuh	Kuasa Pengguna Anggaran	Usman, SH	Usman, SH	
	Pejabat Pembuat Komitmen	Windy Safitra, S.Kom	Windy Safitra, S.Kom	
	Pejabat Penanda tangan SPM	Rahmaida Susrianti, S.HI	Rahmaida Susrianti, S.HI	
	Bendahara Pengeluaran	Fitri Darmayanti, S.Kom	Fitri Darmayanti, S.Kom	
	Staff Pengelola Keuangan	Winda Oktavia, S.Kom	Winda Oktavia, S.Kom	

DAFTAR DAN LAMPIRAN

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Agama Payakumbuh

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A.	Peralatan dan Mesin	264	2.099.795.041	1.456.766.840	643.028.201
1.	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	449.176.003	397.810.288	51.365.715
2.	Alat Ukur	0	0	0	0
3.	Alat Bantu	1	235.600.200	50.485.758	185.114.442
4.	Alat Kantor	45	262.118.550	169.652.300	92.466.250
5.	Alat Rumah Tangga	176	749.856.778	525.104.508	224.752.270
6.	Alat Studio	6	60.558.340	49.998.702	10.559.638
7.	Alat Komunikasi	1	9.282.500	9.282.500	0
8.	Peralatan Pemancar	1	13.250.000	11.262.500	1.987.500
9.	Unit Alat Laboratorium	0	0	0	0
10.	Senjata Api	0	0	0	0
11.	Komputer Unit	18	226.327.160	167.831.092	58.496.068
12.	Peralatan Komputer	9	93.625.510	75.339.192	18.286.318
13.	Peralatan Olah Raga	0	0	0	0
B.	Gedung dan Bangunan		10.059.640.900	506.158.502	10.130.534.398
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	3	10.636.692.900	506.158.502	10.130.534.398
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0	0	0
1.	Bangunan Pengaman Sungai/pantai & Penanggulangan Bencana Alam	0	0	0	0
D.	Aset Tetap Lainnya		0	0	0
1.	Bahan Perpustakaan Tercetak	0	0	0	0
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan	1	7.485.000	7.485.000	0
1.	Alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	0	0
2.	Alat Ukur	0	0	0	0
3.	Alat Pengolahan	0	0	0	0

4. Alat Kantor	0	0	0	0
5. Alat Rumah Tangga	0	0	0	0
6. Alat Studio	0	0	0	0
7. Alat Komunikasi	0	0	0	0
8. Senjata Api	0	0	0	0
9. Komputer Unit	0	0	0	0
10. Peralatan Komputer	0	0	0	0
11. Peralatan Olah Raga	0	0	0	0
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap				
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya		12.743.972.941	1.970.410.342	10.773.562.599

